

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori

2.1.1 Pengawasan

Menurut Yahya (2006, 133) Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Sedangkan Tjutju Yuniarsih dan Suwanto (2013, 93) mengartikan pengawasan adalah proses evaluasi untuk mengukur kesesuaian dan kelancaran pelaksanaan kegiatan, serta ketercapaian hasil berdasarkan rencana yang sudah ditetapkan. Begitu pula dengan Rahayu Relawati (2012, 107) pengawasan (controlling) adalah bagian terakhir dari fungsi manajemen. Pengawasan merupakan proses evaluasi oleh manajer untuk menemukan apakah pelaksanaan kegiatan sudah konsisten dengan rencana dan apakah tujuan organisasi sudah tercapai. Winardi (2000,585) pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Dalam teori Kadarman (2001, 159) mengatakan bahwa pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut,

serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan. Senada dengan pendapat diatas, Manulang (2005, 4) dalam karyanya Dasar-dasar Manajemen, mendefinisikan pengawasan sebagai: “Suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”.

Dengan demikian pengawasan adalah suatu tindakan yang membandingkan antara hasil yang ingin dicapai dengan hasil pada kenyataannya di lapangan. Hal ini guna untuk mengetahui seberapa jauh berhasilnya pengawasan itu dilakukan oleh suatu organisasi.

2.1.1.1 Fungsi dan Tujuan Pengawasan

Fungsi pengawasan adalah suatu fungsi dimana tindakan atau proses kegiatan itu dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan kesalahan, kegagalan, untuk kemudian dilakukan perbaikan dan menjaga agar pelaksanaan berbeda dengan rencana yang ditetapkan. Namun sebaliknya, sebaik apapun rencana yang telah ditetapkan, juga tetap menemukan pengawasan. Manullang (1998, 88) mengartikan fungsi pengawasan ialah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula

Menurut Rahayu Relawati (2012, 111), fungsi pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan tujuan organisasi yang merupakan standar pelaksanaan kegiatan
2. Memonitor pelaksanaannya
3. Membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar yang ditentukan
4. Melakukan tindakan koreksi apabila ada penyimpangan.

Rahayu Relawati (2012, 107) tujuan dari pengawasan adalah untuk menghindari terjadinya penyimpangan, akan tetapi apabila penyimpangan tersebut sudah terlanjur terjadi maka peran fungsi pengawasan adalah mengembalikan arah kegiatan pada tujuan yang sudah ditetapkan semula.

2.1.1.2 Bentuk-Bentuk Pengawasan

Menurut Yohanes Yahya (2006, 134), ada tiga tipe dasar pengawasan, yaitu:

1. Pengawasan Pendahuluan, atau sering disebut *Steering Controls* dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan.
2. Pengawasan Concurrent, atau pengawasan ya-tidak, merupakan suatu proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu atau syarat tertentu harus dipenuhi terlebih dahulu agar lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.
3. Pengawasan umpan balik, dimaksud sebagai alat pengukur untuk mengetahui hasil-hasil dari suatu yang telah diselesaikan

2.1.1.3 Jenis – Jenis Pengawasan

Menurut Maringan (2004, 65) pengawasan diklasifikasikan menjadi 2 jenis yakni pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif, maupun dengan sistem investigatif. Metode ini dimaksudkan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan sistem pengawasan langsung oleh atasannya disebut *built in control*.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan Tidak Langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya. Laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata deretan angka-angka atau statistik yang berisi gambaran atas hasil kemajuan yang telah tercapai sesuai dengan pengeluaran biaya/ anggaran yang telah direncanakan. Kelemahan dari pengawasan tidak langsung ini tidak dapat segera mengetahui kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang lebih banyak.

Pengawasan ditinjau dari sifatnya, kegiatan pengawasan dibedakan menjadi dua jenis yaitu, Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif (Maringan, 2004, 64), sebagai berikut:

1. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut preaudit.

2. Pengawasan Represif

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan.

Pengawasan menurut ruang lingkungannya dibedakan menjadi pengawasan internal dan pengawasan eksternal, sebagai berikut:

1. Pengawasan Internal

Pengertian pengawasan internal dalam arti luas dapat dibagi dua yaitu pengawasan administratif dan pengawasan akuntansi. Pengawasan internal yang baik merupakan alat yang dapat membantu pimpinan lembaga pendidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Melalui pengawasan internal yang efektif, pimpinan lembaga pendidikan juga dapat menilai apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan lembaga pendidikan dapat tercapai. Jenis pengawasan menurut ruang lingkungannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu “pengawasan dari dalam (Internal Control) dan pengawasan dari luar (Eksternal Control).

Pengawasan internal (Pengawasan dari dalam) ialah pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/ unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi.

Aparat/ unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi.

Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya internal control. (Maringan, 2004, 61)

Dari definisi pengawasan internal terdapat beberapa konsep dasar yaitu:

a. Pengawasan internal merupakan proses.

Pengawasan internal merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. Pengawasan internal itu sendiri bukan merupakan suatu tujuan. Pengawasan internal merupakan suatu rangkaian tindakan yang bersifat pervasif dan menjadi bagian tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan, dari infrastruktur entitas.

b. Pengawasan internal dijalankan oleh orang

Pengawasan internal merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. Pengawasan internal itu sendiri bukan merupakan suatu tujuan. Pengawasan internal merupakan suatu rangkaian tindakan yang bersifat pervasif dan menjadi bagian tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan, dari infrastruktur entitas.

c. Pengawasan internal ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan: pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi.

2. Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal (external control) ialah pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat / unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Terhadap suatu departemen, aparat pengawasan ini bertindak atas nama pemerintah/ presiden melalui menteri keuangan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, ialah pemeriksaan/pengawasan yang bertindak atas nama negara Republik Indonesia. . (Maringan, 2004, 62)

Pengawasan menurut metode pengawasannya:

1. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan atau atasan langsung suatu organisasi atau unit kerja terhadap bawahannya dengan tujuan untuk mengetahui atau menilai program kerja yang ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional, baik yang berasal dari internal Pemerintah, maupun dari lingkungan eksternal Pemerintah. (Makmur 2011, 67)

2.1.1.4 Prosedur Pengawasan

Proses pengawasan biasanya terdiri paling sedikit lima tahap (langkah). Tahap-tahapnya menurut George Terry (dalam Manullang, 2010, 173) yakni:

1. Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan)

Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai satu satuan pengukuran yang dapat digunakan menjadi “patokan” untuk penilaian hasil-hasil. Standar berguna antara sebagai alat pembandingan di dalam pengawasan, alat pengukur untuk menjawab pertanyaan berapa suatu kegiatan atau suatu hasil telah dilaksanakan, sebagai alat untuk membantu pengertian yang lebih tepat antara pengawas dan yang diawasi, dan sebagai cara memperbaiki uniformitas.

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Menilai atau mengukur dapat dilakukan melalui laporan baik lisan maupun tertulis, buku catatan harian tentang pekerjaan itu, dapat berupa bagan jadwal atau grafik produksi, inspeksi atau pengawasan langsung, pertemuan dengan petugas-petugas yang bersangkutan, survey yang dilakukan oleh tenaga staf atas badan tertentu atau melalui penggunaan alat teknis.

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Maksud dari tahap ini adalah untuk mengetahui apakah di antara hasil dan standar yang telah ditetapkan terdapat perbedaan, jika ada seberapa besar perbedaan itu, kemudian diputuskan apakah perlu dilakukan perbaikan dari perbedaan itu atau tidak.

4. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar perencanaan

penganalisaan penyimpangan-penyimpangan, Perbaikan atau pembetulan terhadap penyimpangan yang terjadi, sehingga pekerjaan tadi sesuai dengan apa yang telah direncanakan

5. Pengambilan tindakan koreksi bila perlu.

Hal ini dilakukan jika terdapatnya perubahan pada standar pengawasan, pengukuran pelaksana maupun cara menganalisis dan menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan yang ada.

2.1.1.5 Pengawasan Yang Efektif

Menurut Siswanto (2011, 149) pengawasan yang efektif yaitu:

1. Ada unsur keakuratan, dimana data harus dapat dijadikan pedoman
2. Tepat waktu, yaitu informasi harus dihimpun dan segera dievaluasi secara cepat
3. Objektif dan Komprehensif, artinya mudah dipahami
4. Terpusat, dengan memutuskan pada bidang yang paling banyak kemungkinan akan terjadi penyimpangan dari standar

5. Secara ekonomi realistik, dimana biaya pengawasan harus ditekan seminimal mungkin
6. Secara organisasi realistik, yaitu cocok dengan keadaan yang ada di organisasi
7. Berkoordinasi dengan arus pekerjaan organisasi, karena dapat menimbulkan sukses atau gagal seluruh operasi
8. Fleksibel, harus dapat menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi, sehingga organisasi dapat segera bertindak untuk mengatasi perubahan yang merugikan atau memanfaatkan peluang baru
9. Preskriptif dan Operasional, pengendalian efektif dapat mengidentifikasi tindakan perbaikan apa yang perlu diambil setelah terjadi penyimpangan dari standar
10. Diterima para anggota organisasi, artinya pengendalian harus bertalian dengan tujuan yang berarti dan diterima

Ada berbagai faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi, menurut Siswanto (2009: 200) yakni:

1. Perubahan lingkungan organisasi

Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi terus menerus dan tidak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi produk dan persaingan baru, ditemukannya bahan baku baru, adanya peraturan pemerintah baru, dan sebagainya. Melalui fungsi pengawasan manajer mendeteksi perubahan-perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi, sehingga mampu

menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan-perubahan yang terjadi.

2. Peningkatan kompleksitas organisasi

Semakin besar organisasi semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin bahwa kualitas dan profitabilitas tetap terjaga, penjualan eceran pada para penyalur perlu dianalisis dan dicatat secara tepat, bermacam-macam pasar organisasi, luar dan dalam negeri, perlu selalu dimonitor. Di samping itu organisasi luar dan dalam negeri, perlu selalu dimonitor. Disamping itu organisasi sekarang lebih bercorak desentralisasi, dengan banyak agen-agen atau cabang-cabang penjualan dan kantor-kantor pemasaran, pabrik-pabrik yang terpisah secara geografis, atau fasilitas-fasilitas penelitian terbesar luas. Semuanya memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan lebih efisien dan efektif

3. Kesalahan-kesalahan

Bila para bawahan tidak pernah membuat kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan. Tetapi kebanyakan anggota organisasi sering membuat kesalahan memesan barang atau komponen yang salah, membuat penentuan harga yang terlalu rendah, masalah-masalah didiagnosa secara tidak tepat. Sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan-kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis.

4. Kebutuhan Manajer untuk mendelegasikan wewenang

Bila manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya tanggung jawab atasan itu sendiri tidak berkurang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugas-tugas yang telah dilimpahkan kepadanya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan. Tanpa sistem pengawasan. Tanpa sistem tersebut, manajer tidak dapat memeriksa pelaksanaan tugas bawahan.

Sehingga tugas manajer adalah menemukan keseimbangan antara pengawasan organisasi dan kebebasan pribadi atau mencari tingkat pengawasan yang tepat. Pengawasan yang berlebihan akan menimbulkan birokrasi, mematikan kreativitas, dan sebagainya, yang akhirnya merugikan organisasi sendiri. Sebaliknya pengawasan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan pemborosan sumber daya dan membuat sulit pencapaian tujuan.

2.1.2 Parkir

2.1.2.1 Pengertian Parkir

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (1998, 1) mendefinisikan bahwa “Parkir adalah keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat sementara”. Menurut kamus besar bahasa Indonesia definisi parkir ialah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan. Warpani (2002, 15) mengatakan bahwa semua kendaraan tidak mungkin bergerak terus, pada suatu saat ia harus berhenti untuk sementara waktu (menurunkan muatan) atau berhenti cukup lama yang disebut parkir. Nawawi (2015, 55) mengartikan parkir adalah tempat menempatkan dengan

memberhentikan kendaraan angkutan/ barang (bermotor maupun tidak bermotor) pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.

2.1.2.2 Fasilitas Parkir

Mengikuti pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Fasilitas Parkir dan jenis parkir dikelompokkan menjadi:

1. Menurut statusnya
 - a. Parkir umum adalah parkir yang menggunakan tanah-tanah, jalan-jalan, lapangan yang dikuasai/dimiliki serta pengelolanya diselenggarakan oleh pemerintah
 - b. Parkir khusus adalah parkir yang menggunakan tanah-tanah yang dikuasai/dimiliki serta pengelolanya diselenggarakan oleh pihak ketiga.
 - c. Parkir darurat adalah parkir di tempat umum, baik yang menggunakan tanah-tanah, jalan-jalan, lapangan yang dikuasai/dimiliki serta pengelolanya diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau swasta
 - d. Taman parkir adalah suatu areal/bangunan parkir yang dilengkapi sarana parkir yang pengelolanya diselenggarakan pemerintah.
 - e. Gedung parkir adalah bangunan yang dimanfaatkan untuk tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau pihak ketiga yang telah mendapat izin dari pemerintah daerah
2. Menurut jenis kendaraan
 - a. Parkir untuk kendaraan tidak bermesin (sepeda)
 - b. Parkir untuk kendaraan bermesin beroda dua (sepeda motor)

- c. Parkir untuk kendaraan bermesin beroda tiga/empat (bemo, mobil, truk, dll

Pemisahan tempat parkir menurut jenisnya mempunyai tujuan agar pelayanan yang diberikan akan lebih mudah, teratur dan tidak ruwet.

- 3. Menurut jenis tujuan parkir
 - a. Parkir penumpang, yaitu parkir untuk menaikkan atau menurunkan penumpang.
 - b. Parkir barang, yaitu parkir untuk bongkar muat barang.
- 4. Menurut metode pengoperasiannya
 - a. Dengan juru parkir (attendant parking) adalah dimana ada petugas parkir yang akan memberikan aba-aba kepada pengemudi kendaraan atau akan membantu memarkirkannya
 - b. Dilakukan sendiri oleh pengemudinya sendiri (self parking), yaitu pengemudi mobil harus memarkirkan mobilnya sendiri
- 5. Menurut pengelolanya
 - a. Pemerintah
 - b. Swasta
 - c. Pemerintah dan swasta

2.1.2.3 Satuan Ruang Parkir

Satuan Ruang Parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor) termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu. Satuan Ruang Parkir (SRP) merupakan unit ukuran yang diperlukan untuk memarkir kendaraan menurut berbagai bentuk penyediannya.

Adapun pengaruh besaran ruang parkir adalah sebagai berikut:

1. Ruang bebas kendaraan parkir.

Untuk sepeda motor, biasanya ruang bebas arah samping diambil 2 cm dan arah memanjang 20 cm.

2. Lebar bukaan pintu kendaraan.

Ukuran lebar bukaan pintu merupakan fungsi karakteristik pemakai kendaraan yang memanfaatkan fasilitas parkir.

Karakteristik pengguna kendaraan yang memanfaatkan fasilitas parkir dibagi menjadi tiga seperti yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1

Lebar Bukaan Pintu Kendaraan

Jenis Bukaan Pintu	Pengguna/Peruntuk Fasilitas Parkir	Golongan
Pintu depan /belakang terbuka tahap awal 55 cm	Karyawan/ pekerja kantor tamu/ pengunjung pusat kegiatan perkantoran, perdaganganeceran/ swalayan, rumah sakit, bioskop	I
Pintu depan/ belakang terbuka penuh 75 cm	Pengunjung tempat olahraga, pusat hiburan/rekreasi, hotel, pusat perdagangan	II

	eceran/swalayan, rumah sakit, bioskop	
Pintu depan terbuka penuh dan ditambah untuk pergerakan kursi roda	Orang cacat	III

Sumber: *Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau Tahun 2022*

3. Penentuan satuan ruang parkir (SRP)

Berdasarkan Tabel 3.1 penentuan Satuan Ruang Parkir (SRP) dibagi atas tiga jenis kendaraan dan berdasarkan penentuan SRP untuk mobil penumpang diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yakni:

- a.
 - Mobil penumpang untuk golongan I
 - Mobil penumpang untuk golongan II
 - Mobil penumpang untuk golongan III
- b. Bus atau truk
- c. Sepeda Motor

2.1.2.4 Kebijakan Parkir

Beberapa kebijakan parkir yang diterapkan di berbagai Negara antara lain sebagai berikut:

1. Kebijakan tarif parkir yang ditetapkan berdasarkan lokasi dan waktu, semakin dekat dengan pusat kegiatan/kota tarif lebih tinggi, demikian juga semakin lama semakin tinggi. Kebijakan ini diarahkan untuk

mengendalikan jumlah parkir di pusat kota/pusat kegiatan dan mendorong penggunaan angkutan umum.

2. Kebijakan pembatasan ruang parkir, terutama di daerah pusat kota maupun pusat kegiatan. Kebijakan ini biasanya dilakukan pada parkir dipinggir jalan yang tujuan utamanya untuk melancarkan arus lalu lintas, serta pembatasan ruang parkir di luar jalan yang dilakukan melalui IMB/Ijin Mendirikan Bangunan.
3. Kebijakan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar ketentuan dilarang parkir dan dilarang berhenti serta pemarkir di luar tempat yang ditentukan untuk itu. Bentuk penegakan hukum dapat dilakukan melalui penilangan ataupun dengan gembok roda seperti yang dilakukan di Palembang.

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan

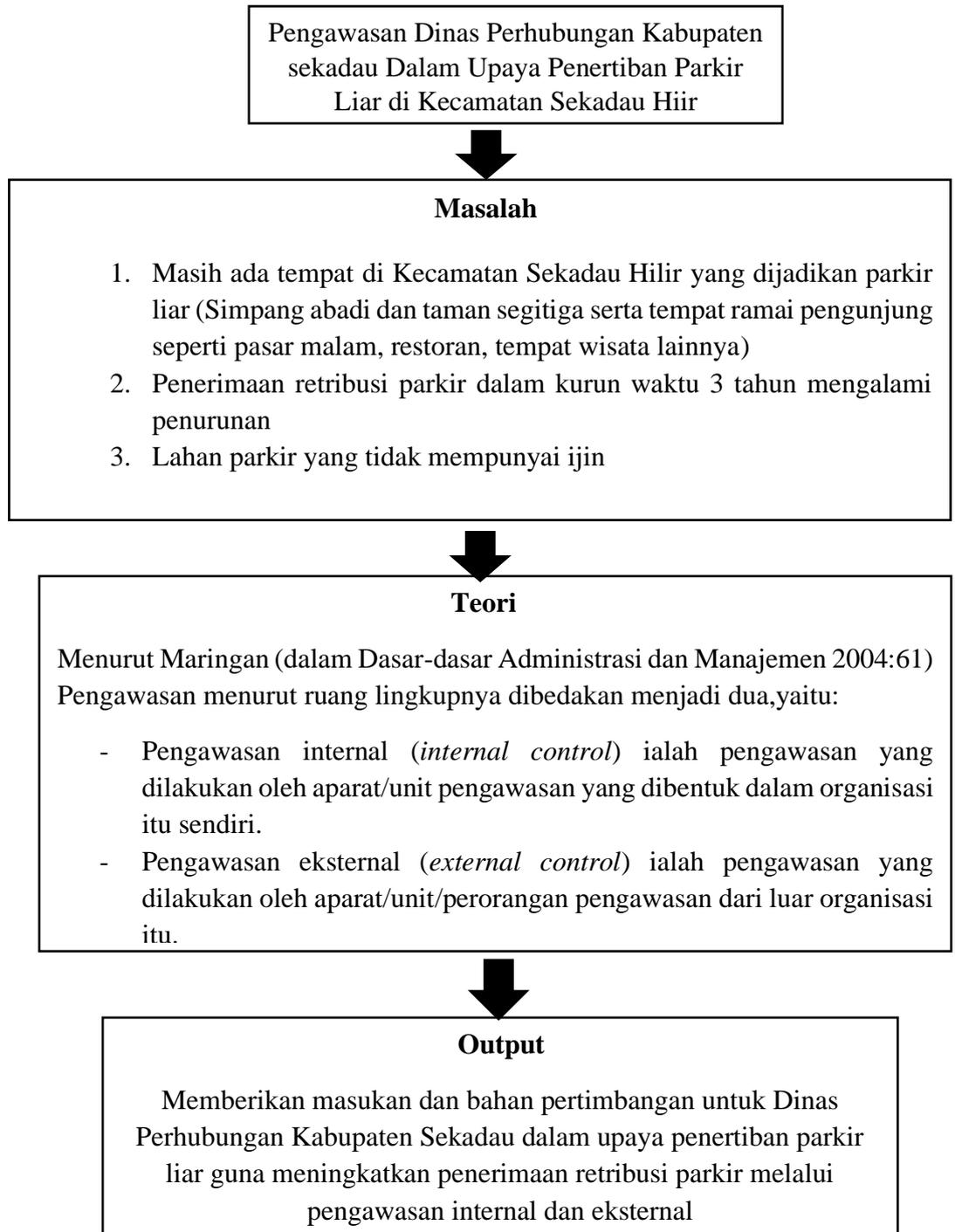
2.2.1 Muhammad Rizqi Lazwardi

Judul penelitian yang ditelitinya ialah Pengawasan Parkir Liar di Sukaramai Trade Centre Oleh Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 284 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Peserta Tata Kerja Unit Pelaksana Tugas Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Masalah penelitian ini mencakup mengenai pengawasan UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap parkir liar terutama di Sukaramai Trade Center Kota Pekanbaru.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan terhadap parkir liar di Sukaramai Trade Centre oleh Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 284 Tahun 2017 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis perparkiran pada dinas perhubungan kota Pekanbaru. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini memfokuskan kepada pengawasan UPT perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam menanggulangi parkir liar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan kota Pekanbaru terhadap pengawasan parkir liar belum berjalan optimal, masih banyak Juru parkir liar yang tidak patuh terhadap peraturan yang ada. Faktor penghambat yang terdapat pada penelitian ini terbagi menjadi dua yakni, faktor internal meliputi, personil pengawasan upt perparkiran, sumber daya operasional, sedangkan faktor eksternal meliputi perilaku pengguna jasa parkir, lahan parkir dan juga lapangan pekerjaan tukang parkir terancam digantikan mesin.

2.3 Kerangka Pikir



2.4 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pengawasan internal yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau dalam mengatasi parkir liar di kecamatan Sekadau Hilir?
2. Bagaimana pengawasan eksternal Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau dalam mengatasi parkir liar di kecamatan Sekadau Hilir melalui masyarakat dan dinas yang terkait?